

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan pembangunan bagi kita semua. Hal ini pun terjadi di bidang geomatika dan konstruksi yang akan melakukan proses analisis perencanaan hingga pelaksanaan suatu proyek. Perencanaan dalam skala yang lebih detail membutuhkan data yang lebih akurat. Ketersediaan data yang lebih lengkap dibutuhkan untuk menjamin representasi kondisi fisik yang lebih nyata detail. Hal ini merupakan konsekuensi dari perencanaan yang akurat karena akan berdampak langsung kepada pembangunan yang dilakukan masyarakat (Suwandi, 2017).

Informasi mengenai batas daerah menjadi hal yang sangat penting. Batas daerah berfungsi untuk menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum sehingga meminimalisir terjadinya konflik batas, perhitungan fiskal daerah, identifikasi dan inventarisasi potensi daerah (Purwanti & Budisusanto, 2015). Di Indonesia, batas daerah pada unit terkecil adalah RT. Informasi spasial hingga lingkup RT sangat diperlukan agar informasi yang disajikan lebih detail dan akurat. Namun ketersediaan data spasial batas RT di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas (Wibowo & Sudarmadji, 2010).

Kegiatan penentuan batas wilayah terdiri atas dua tahap yaitu tahap penetapan dan tahap penegasan. Penetapan batas daerah di darat adalah proses penetapan batas daerah secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang sudah disepakati. Sedangkan penegasan batas daerah di darat adalah proses penegasan batas daerah secara langsung di lapangan dengan memasang pilar-pilar batas. Banyak cara dalam menentukan batas wilayah darat, diantaranya dengan melakukan pengukuran terestris, pengukuran fotogrametris, pengukuran melalui citra satelit inderaja, ataupun secara kartometrik (Riadi & Khifni, 2011).

Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dimana sebelumnya adalah Permendagri No. 1 tahun 2006, menerangkan proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja ataupun peta dasar dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Selain itu, proses penetapan batas wilayah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, dimana proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana dan pemberi informasi sekaligus sebagai pelaku pemetaan (Hidayat, 2005; Prayitno, 2012). Pembuatan peta batas wilayah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghindari masalah konflik batas dan sebagai sarana optimalisasi pembangunan di daerah tersebut, serta menganalisis pembuatan peta batas wilayah administrasi RT/RW sub wilayah Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuatan peta batas wilayah kelurahan yang sesuai berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

A. Tujuan

1. Mendapatkan hasil dari analisis pembuatan peta administrasi yang sesuai dengan permendagri Nomor 45 Tahun 2016

B. Manfaat

Memberikan gambaran informasi kepada Desa/Kelurahan tentang penegasan batas wilayah Kelurahan yang sesuai dengan permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dan sebagai acuan untuk pengembangan desa yang sesuai dengan batas wilayahnya.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Lokasi yang digunakan yaitu Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan
2. Pembuatan *layout* peta batas wilayah Kelurahan Babat

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini berisi bab – bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini dijelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II DASAR TEORI

Dalam bagian ini dijelaskan tentang teori-teori yang berkenaan dengan hasil.

3. BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam bagian ini dijelaskan tentang pelaksanaan-pelaksanaan penelitian seperti persiapan, pengukuran dilapangan serta pengolahan data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan dan menjelaskan pembahasan dari hasil pemrosesan data.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan saran dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.